

Artikel 2

Laporan Audit Standar yang Tidak Standar

Suwardjono
Fakultas Ekonomi¹ UGM

Artikel ini telah dimuat dalam majalah *Akuntansi* edisi Agustus 1990.

Laporan audit (*audit report*) atau sering juga disebut laporan akuntan merupakan laporan atau pernyataan resmi untuk memberi pendapat apakah suatu laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu unit organisasi dan apakah penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebut dengan *generally accepted accounting principles (GAAP)*. Dalam tulisan ini istilah laporan audit akan digunakan sebagai ganti laporan akuntan semata-mata karena istilah laporan audit lebih deskriptif dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini. Laporan audit dapat dikatakan sebagai laporan resmi karena penyusunannya maupun siapa yang berhak mengeluarkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di samping itu, di dalam laporan tersebut terkandung suatu tanggung jawab tertentu dari penerbit dan penanda tangan laporan tersebut.

Sebagai laporan resmi, format dan susunan kata-kata yang terkandung di dalamnya juga sudah tertentu dan mengikuti standar penyusunan laporan yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang untuk itu. Di Amerika, badan yang berwenang untuk menentukan hal tersebut adalah The Auditing Standards Board, suatu badan yang ada di bawah American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Di Indonesia badan yang berwenang untuk itu adalah Komite Norma Pemeriksaan Akuntan (KNPA) yang ada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Bila akuntan publik (auditor) telah melakukan audit dan syarat-syarat tertentu telah dipenuhi maka akuntan dapat menerbitkan laporan audit standar. Disebut dengan laporan audit standar karena format dan kata-kata yang terdapat dalam laporan tersebut sudah tertentu dan akuntan tidak dapat menyusun kata-kata yang terdapat dalam laporan secara sembarangan. Lebih dari itu, bukan saja kata-kata yang terdapat dalam laporan tersebut menjadi acuan penulisan laporan tetapi interpretasi terhadap kata-kata yang terdapat dalam laporan tersebut juga sudah tertentu. Artinya kata-kata dalam laporan standar tidak dapat diarti-

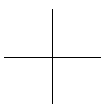
¹Sejak tahun 2007 menjadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB). Di sini, bisnis ditulis *business*.

kan atau diberi makna lain selain apa yang dimaksudkan dalam merancang laporan standar tersebut. Bagi badan penyusun standar pengauditan, perancangan bentuk dan isi serta penentuan kata-kata (*wording*) merupakan pekerjaan yang penting dan memerlukan pemikiran yang serius dan bukan asal jadi saja. Karena menjadi format standar maka simbol-simbol (dalam bentuk kata-kata) yang terdapat dalam laporan harus benar-benar cermat dalam merefleksikan makna yang memang ingin disampaikan. Dengan demikian bila seorang akuntan berani menandatangani laporan standar tersebut maka akuntan tersebut tidak dapat mengelak dari segala tanggung jawab yang melekat dalam interpretasi laporan audit tersebut. Bila laporan audit tidak dibuat standar, dapat dibayangkan bahwa akan banyak akuntan mengarang sendiri kata-kata dalam laporannya dan kata-kata tersebut dibuat dengan pintarnya sehingga akuntan selalu mempunyai dalih untuk mengelak dari tanggung jawab tertentu dengan menggunakan permainan kata. Hal ini dapat dipahami mengingat pekerjaan audit mengandung risiko baik teknis maupun ekonomik. Risiko ekonomik bagi akuntan misalnya adalah timbulnya tuntutan ganti rugi dari pihak yang merasa dirugikan karena mempercayai pendapat akuntan yang ternyata salah.

Kalau format laporan audit telah ditentukan oleh badan yang berwenang, para praktisi tentunya harus mengikuti format tersebut secara tepat dan cermat. Dengan demikian laporan akuntan yang terdapat dalam praktik, khususnya laporan akuntan standar, kata-katanya akan sama dengan kata-kata dalam laporan standar yang ditentukan oleh badan resmi. Penyimpangan terhadap hal ini sama saja dengan tidak melaksanakan *generally accepted auditing standards (GAAS)* karena ketentuan resmi dari badan penyusun standar audit merupakan bagian dari GAAS. Penyimpangan dapat menyebabkan bahwa laporan audit dinyatakan tidak sah. Di lain pihak, ketaatan terhadap format akan menempatkan auditor berada di bawah pembelaan profesi seandainya terjadi tuntutan yang timbul karena semata-mata kesalahan interpretasi oleh pemakai laporan audit.

Artikel ini menunjukkan dan membahas kenyataan bahwa praktik penyusunan laporan audit di Indonesia belum mengikuti standar penulisan yang terdapat dalam ketentuan resmi yang tercantum dalam buku *Norma Pemeriksaan Akuntan* (penulis menyebutnya sebagai buku karena NPA sebagai buku tidak sama maknanya dengan GAAS). Penulis mencoba untuk menganalisis sebab-sebab perbedaan tersebut. Pembahasan akan dibatasi dan difokuskan pada penulisan atau pengungkapan makna penting yang terdapat dalam laporan akuntan yaitu *generally accepted accounting principles (GAAP)* atau *prinsip akuntansi berterima umum (PABU)*.² Menurut penulis, masalah ini sangat penting dan kritis karena GAAP merupakan kriteria untuk menentukan kewajaran laporan keuangan. Kekurangpahaman, kekurangjelasan dan kesalahan penafsiran makna GAAP akan sangat berpengaruh terhadap perilaku akuntan dan kualitas audit. Bagaimana mungkin seseorang melakukan audit dan menyatakan pendapat kalau kriteria untuk memberi pendapat tidak dipahami secara penuh atau hanya dipahami se-

²Mengenai makna dan arti PABU, baca Suwardjono, *Seri Teori Akuntansi: Perekayasa Akuntansi Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 1989), hlm. 30-44. Baca juga Artikel 3 dalam kumpulan artikel ini.



cara samar- samar. Bila laporan audit diterbitkan tanpa pemahaman makna prinsip akuntansi berterima umum yang semestinya maka laporan audit beserta laporan keuangannya barangkali memenuhi syarat yuridis tetapi secara substantif laporan audit tersebut hanya merupakan formalitas belaka.

Untuk memberi gambaran praktik penyusunan laporan audit di Indonesia, data diambil dari beberapa penerbitan seperti laporan tahunan dan prospektus perusahaan yang akan atau sudah melakukan *go public*. Perusahaan yang akan menjual saham di bursa diwajibkan untuk menyertakan laporan keuangan auditan (*audited financial statements*) dalam prospektusnya. Artikel ini bertujuan menunjukkan kenyataan bahwa sekarang ini masih terdapat kerancuan pemahaman mengenai hubungan antara buku PAI dan makna GAAP sehingga sehingga terdapat variasi dalam cara mengungkapkan istilah GAAP dalam laporan audit standar.

Laporan Audit Standar di Amerika

Tidak dapat disangkal bahwa laporan audit standar di Indonesia dirancang dan disusun berdasarkan laporan audit standar di Amerika. Oleh karena itu, cukup relevan untuk menelaah format dan isi laporan audit yang dianut di Amerika. Peraga 1 menunjukkan laporan bentuk standar yang mula-mula digunakan dan Peraga 2 menunjukkan laporan bentuk standar yang baru yang sekarang berlaku di Amerika.

Peraga 1

We have examined the balance sheet of X Company as of (at) December 31, 19XX, and the related statements of income, retained earnings and changes in financial position for the year then ended. Our examination was made in accordance with generally accepted auditing standards and accordingly, included such tests of the accounting records and such other auditing procedures as we considered necessary in the circumstances.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly the financial position of X Company as of (at) December 31, 19XX, and the results of its operations and the changes in its financial position for the year then ended, in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

Sumber: AICPA. *Codification of Statements on Auditing Standards*.
New York: AICPA, 1986, AU 5009.05

Pada dasarnya ada dua bagian pokok yang terdapat dalam laporan audit yaitu paragraf lingkup audit (*scope paragraph*) dan paragraf pendapat (*opinion paragraph*). Dalam laporan audit yang baru ditambahkan paragraf pengantar (*introductory paragraph*) untuk menunjukkan beberapa fakta mengenai audit yang

dilakukan akuntan dan penjelasan mengenai tanggung jawab auditor dan manajemen berkenaan dengan laporan audit tersebut.

Peraga 2

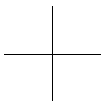
We have audited the accompanying balance sheet of X Company as of December 31, 19XX, and the related statements of income, retained earnings and cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material effects, the financial position of X Company as of (at) December 31, 19XX, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in conformity with generally accepted accounting principles.

Sumber: Kell, Walter G., et al., *Modern Auditing*, 4th ed.,
New York: John Wiley & Sons, 1989, hlm. 43.

Laporan audit yang baru menggunakan frasa "*we have audited*" (**kami telah mengaudit**) dan bukannya "*we have examined*" (**kami telah memeriksa**) karena kata "memeriksa" dianggap terlalu umum dan kurang deskriptif dalam menjelaskan apa sebenarnya yang dilakukan akuntan. Kata audit mempunyai pengertian khusus dan merupakan istilah teknis yang deskriptif untuk menunjukkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh auditor. Walaupun hal ini masih merupakan masalah untuk dibahas dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan laporan audit standar di Indonesia, masalah ini bukan menjadi fokus yang dituju artikel ini. Namun demikian, perlu dicatat hal menarik yang dapat dipetik dari dua laporan tersebut yaitu bahwa organisasi profesi segera dapat mengadaptasi perubahan yang fundamental kalau memang hal demikian dipandang perlu dan mempunyai implikasi jangka panjang. Laporan audit (dan juga beberapa hal dalam akuntansi termasuk istilah) bukan merupakan jimat yang sakti tetapi lebih merupakan alat untuk mencapai tujuan dan oleh karena itu laporan dan istilah tersebut tidaklah steril terhadap perubahan kalau memang perubahan tersebut akan membawa laporan audit (dan hal-hal lain dalam akuntansi) menjadi lebih efektif sebagai alat.³ Kalau akuntansi dipandang sebagai alat yang harus efektif, tidak berlaku lagi alasan "*tidak enak didengar*" atau "*mengandung nilai sejarah*"



semata-mata untuk mempertahankan sesuatu yang sudah terlanjur populer namun salah kaprah.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa istilah *generally accepted auditing standards* dan *generally accepted accounting principles* dalam kedua laporan tersebut tidak pernah ditulis dengan huruf besar (sebagai singkatan tentunya dapat digunakan huruf besar). Hal ini bukan tidak disengaja. *Generally accepted auditing standards* dan *generally accepted accounting principles* bukan sekadar frasa dalam laporan audit tetapi merupakan istilah teknis yang utuh. Bagi profesi akuntan di Amerika, terdapat aspek yuridis yang melekat pada istilah tersebut. Artinya kalau terdapat suatu perkara hukum yang menyangkut laporan audit, organisasi profesilah yang dapat menentukan apakah tindakan auditor dalam menentukan prosedur audit dan kebijaksanaan (*judgment*) auditor dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan masih dalam batas-batas yang diterima profesi khususnya apabila penentuan prosedur atau prinsip yang dipilih dan dasar kebijaksanaan auditor tidak diatur secara khusus dalam pengumuman/publikasi resmi (*pronouncements*). Pengertian GAAS dan GAAP yang terdapat dalam laporan audit tidak terbatas pada apa yang termuat dalam buku *Codification of Statements on Auditing Standards* dan *FASB's Original Pronouncements* (yang berisi antara lain *Statements of Financial Accounting Standards*).⁴ Jadi GAAS dan GAAP lebih mengacu pada suatu konsep daripada suatu buku. Dengan pengertian yang demikian, akuntan di Amerika dapat membedakan dengan tegas mana yang disebut standar dan mana yang disebut prinsip akuntansi. Penulis menduga bahwa barangkali sekarang ini masih banyak orang di kalangan akuntansi yang tidak dapat menjelaskan perbedaan antara standar akuntansi dan prinsip akuntansi berterima umum.

Laporan Audit Standar di Indonesia

Sumber autoritatif untuk menemukan bentuk laporan audit standar di Indonesia tidak lain adalah buku Norma Pemeriksaan Akuntan yang dikeluarkan oleh IAI. Peraga 3 di halaman berikut menunjukkan laporan audit standar versi buku NPA. Karena buku NPA merupakan penerbitan yang autoritatif, apa yang terdapat dalam buku tersebut mestinya menjadi acuan para akuntan publik yang berpraktik di Indonesia. Dalam artikel ini justru akan ditunjukkan bahwa hal ini tidak terjadi khususnya dalam penyebutan GAAP.

Kalau diperhatikan, laporan akuntan standar tersebut sebenarnya dirancang atas dasar gagasan yang terdapat dalam laporan audit standar di Amerika sebelum perubahan (atau mungkin dapat dikatakan sebagai terjemahannya). Katakanlah bahwa laporan akuntan standar yang lama versi AICPA masih relevan.

³Baca selanjutnya, David L. Landsittel, "The Auditor's Standard Report: The Last Word or In Need of Change?" *Journal of Accountancy* (February 1987), hlm. 80-84. Lihat juga Elliot, Robert K. dan Peter D. Jacobson, "The Auditor's Standard Report: The Last Word or In Need of Change?" *Journal of Accountancy*, (Februari 1985).

⁴Lihat AICPA, *Codification of Statements on Auditing Standards* (New York: AICPA, 1986).

Peraga 3

Kami telah memeriksa neraca perusahaan X per 31 Desember 19X2 dan 19X1 serta perhitungan rugi laba, laba yang ditahan, dan laporan perubahan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Pemeriksaan kami lakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan dan oleh karenanya meliputi pengujian terhadap catatan akuntansi dan prosedur pemeriksaan lainnya yang kami pandang perlu sesuai dengan keadaan.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan X per 31 Desember 19X2 dan 19X1 serta hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

Sumber: IAI, *Norma Pemeriksaan Akuntan*, hlm. 78-79.

Karena laporan audit merupakan laporan formal maka bahasa yang digunakan juga merupakan bahasa yang formal dan lugas. Oleh karena itu, pendekatan penerjemahan secara sintaksis dapat dilakukan kecuali untuk beberapa istilah yang mempunyai makna khusus dan bersifat lingkungan.⁵ Sekali lagi, GAAS dan GAAP bukan merupakan frasa melainkan istilah teknis dan bersifat lingkungan. Artinya kalau tidak diberi pewatas (*modifier*) maka GAAS dan GAAP adalah yang berlaku di Amerika.

Secara keseluruhan, laporan audit standar versi buku NPA sebagai terjemahan sintaksis dapat dikatakan memadai dan penambahan pewatas tempat (Indonesia) merupakan pertimbangan yang masuk akal. Kalau demikian mestinya makna yang terkandung dalam laporan audit standar yang asli tidak ada yang tercecceur kecuali bahwa penerjemahan GAAS dan GAAP sebagai suatu istilah teknis kurang begitu mengena. Fokus artikel ini adalah pengambilalihan dan penerjemahan GAAP dalam laporan audit di Indonesia.

Kalau memang pewatas tempat perlu diberikan maka sebelum diterjemahkan tentunya GAAP harus diubah dahulu menjadi *GAAP-Indonesia* atau *Indonesian GAAP* yang berarti prinsip-prinsip yang telah dipilih (melalui standar) atau dianggap disepakati berlaku untuk pelaporan di Indonesia. Cara seperti ini sejalan dengan praktik yang dilakukan di Jepang. Untuk menyebut GAAP yang berlaku di Jepang, organisasi profesi di Jepang menyebutnya sebagai GAAP-Japan sebagai *counterpart* GAAP yang bila tanpa pewatas berarti GAAP-US.⁶

⁵Untuk mengetahui teori penerjemahan baca, Anton M. Moeliono, "Beberapa Aspek Masalah Penerjemahan ke Bahasa Indonesia," "Terms and Terminological Language," "Implikasi Penerjemahan dalam Pengembangan Bahasa Indonesia," dan "Aspek Teoretis dalam Penerjemahan," bab-bab dalam *Kembara Bahasa: Kumpulan Karangan Tersebar* (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 54-74 dan 195-208.

Karena GAAP bukan merupakan frasa maka penerjemahannya juga tidak dapat dilakukan begitu saja seperti sebuah kalimat. Atas dasar kaidah bahasa, penulis berpendapat bahwa istilah **prinsip akuntansi berterima umum** merupakan padan kata yang tepat untuk GAAP sebagai satu pengertian. Kata *berterima* mempunyai makna sebagai keadaan yaitu bahwa sesuatu "dalam keadaan diterima dan dipraktikkan secara luas" sedangkan kata *diterima* mempunyai makna sebagai proses atau peristiwa.⁷ Yang jelas, makna *generally accepted* tidak dapat begitu saja diganti dengan *yang lazim*, *yang berlaku umum*, *yang berlaku* atau *yang diterima umum* ("diterima umum" berarti diterima oleh publik sehingga maknanya menyimpang dari aslinya). Alasannya adalah bahwa untuk dapat dikatakan *generally accepted* (berterima umum) suatu prinsip harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, suatu prinsip dapat dikatakan berterima kalau prinsip tersebut merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh badan berwenang (berupa standar akuntansi) atau kalau tidak ada ketentuan resmi tersebut auditor atau profesi mengakui keberadaan suatu prinsip (karena sudah banyak dipraktikkan dalam industri tertentu atau merupakan praktik bisnis yang sehat) dan mengakui kelayakan prinsip tersebut sebagai suatu pedoman. Dapat disimpulkan bahwa laporan akuntan standar versi NPA yang hanya menyebutkan "*prinsip akuntansi Indonesia*" sebagai padan kata *generally accepted accounting principles Indonesia* jelas masih kurang lengkap karena belum memasukkan makna *generally accepted*.

Dengan demikian, kalau suatu frasa sebagai istilah mempunyai makna khusus, maka keseluruhannya harus diterjemahkan secara sintaksis sebagai istilah. Penerjemahan GAAP secara utuh jelas tidak terefleksi dalam laporan audit versi buku NPA. Setelah kesatuan pengertian diterjemahkan secara sintaksis, kemudian terjemahan sintaksis tersebut diberi arti semantis melalui pendefinisian atau pendeskripsian (pemerian). Telah disebutkan bahwa PABU merupakan terjemahan sintaksis GAAP yang cukup tepat dan arti semantisnya dapat disebutkan yaitu sekumpulan atau keseluruhan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan dan praktik-praktik yang dipilih atau dianggap berterima secara umum serta dijadikan pedoman umum di lingkungan (negara) yang dalam hal ini adalah Amerika. Seluruh konsep, standar, prosedur, metode, praktik, kebiasaan yang dianggap berterima di Indonesia itulah barangkali yang disebut dalam buku NPA sebagai *kerangka kerja prinsip akuntansi Indonesia*⁸ (atau lebih tepatnya *kerangka kerja prinsip akuntansi berterima umum Indonesia*). Masalahnya sekarang adalah seperti apakah wajah kerangka kerja PABU Indonesia tersebut. Steven Rubin menamakan kerangka kerja tersebut "*The House of GAAP*"⁹ Jelaslah bahwa *prinsip akuntansi Indonesia* (dengan huruf kecil) tidak dapat dipadankan dengan

⁶Frederick D.S. Choi dan Kazuo Hiramatsu, *Accounting and Financial Reporting in Japan* (Berkshire, England: Van Nostrand Reinhold UK, Co., Ltd., 1987), hlm. 111-129. Lihat pula, Walter G. Kell, William C. Boynton, dan Richard E. Ziegler, dan Richard E. Ziegler, *Modern Auditing*, edisi keempat (New York: John Wiley & Sons, 1989), hlm. 663-665.

⁷Lihat arti kata *berterima* dan contoh penggunaannya dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1988), hlm. 397. Lihat juga J.S. Badudu, *Inilah Bahasa Indonesia Yang Benar* (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 76-79.

⁸IAI, *Norma Pemeriksaan Akuntan* (Jakarta: PT Temprint, 1986), Bab VIII, prg. 5.

GAAP-Indonesia walaupun maksudnya sebenarnya demikian. Karena hal inilah orang sering mempunyai kesan yang keliru bahwa *buku* PAI sama dengan GAAP-Indonesia.¹⁰

Peraga 4

Laporan Auditor Independen

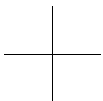
Kami telah mengaudit neraca PT X tertanggal 31 Desember 19XX, dan laporan rugi-laba, laporan laba ditahan, dan laporan aliran kas yang berkaitan dengan neraca tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal neraca tersebut. Laporan-laporan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen PT X. Tanggung jawab kami adalah menyatakan suatu pendapat atas laporan-laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit sesuai dengan standar pengauditan berterima umum Indonesia. Standar tersebut mengharuskan agar kami merencanakan dan melaksanakan audit tersebut untuk memperoleh keyakinan yang layak mengenai apakah laporan-laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material. Atas dasar suatu pengujian (tes), suatu audit meliputi pemeriksaan bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah rupiah dan pengungkapan-pengungkapan dalam laporan keuangan. Suatu audit juga meliputi baik penentuan kelayakan prinsip akuntansi yang digunakan dan taksiran-taksiran penting yang ditentukan oleh manajemen, maupun peng-evaluasian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan landasan yang layak untuk pendapat kami.

Menurut pendapat kami, dalam segala hal yang material, laporan-laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar posisi keuangan PT X pada tanggal 31 Desember 19XX, dan hasil operasinya dan aliran kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum Indonesia.

⁹Steven Rubin, "The House of GAAP," *Journal of Accountancy* (June 1984), hlm. 122-129. Baca juga pembahasan lebih lanjut dalam Artikel 3 di kumpulan artikel ini. Lihat juga arti laporan audit dalam Carmichael, D. R., "What does the independent auditor's opinion really mean?" *Journal of Accountancy* (November 1974).

¹⁰Lihat misalnya, Irwan Rinaldi, "Akuntan: Sudah Saatnya 'Go- Public'," *Akuntansi* No. 2 (Februari 1990), hlm. 29. Dalam artikel tersebut, nampaknya penulis menyamakan antara GAAP dengan buku PAI dan GAAS dengan buku NPA. Barangkali yang dimaksud PAI oleh penulis adalah bukan buku PAI tetapi konsep atau kerangka *prinsip akuntansi Indonesia* dan yang dimaksud dengan NPA adalah norma pemeriksaan akuntan sebagai suatu konsep. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa penyebutan GAAP sebagai suatu istilah utuh (bukan singkatan) tidak pernah menggunakan huruf besar (kecuali tentu saja untuk judul paragraf). Karena pemahaman yang diperoleh selama kuliah, mungkin banyak akuntan dewasa ini yang mempunyai pemahaman seperti itu.



Dengan berbagai argumentasi dan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa kalau makna GAAP yang ada dalam laporan audit standar dari Amerika ingin dijadikan landasan perancangan format laporan audit standar di Indonesia maka akan lebih mengena bila *generally accepted accounting principles in Indonesia* disebut atau diberi padan istilah *prinsip akuntansi berterima umum Indonesia* dan tidak cukup hanya disebut *prinsip akuntansi Indonesia*. Tujuannya jelas, pertama agar makna kesatuan istilah yang sebenarnya tidak hilang atau tercecceh dan kedua, agar pengertiannya tidak rancu dengan PAI sebagai nama buku yang sebenarnya tidak tepat disebut demikian. Menilik isinya, buku PAI (tentu saja dengan beberapa perubahan seperlunya) akan lebih tepat kalau disebut sebagai **Konsep Pelaporan Keuangan Indonesia** atau **Kerangka Acuan Konseptual Pelaporan Keuangan Indonesia** atau **Perangka Konseptual Pelaporan Finansial Indonesia** yang berfungsi sebagai pengarah atau haluan pelaporan keuangan di Indonesia. Tentu saja Konsep tersebut akan menjadi bagian dari PABU-Indonesia. Agar operasional, konsep tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk pernyataan standar akuntansi (*statements of financial accounting standards*).

Dengan berbagai pertimbangan di atas, kalau kerangka pikir perancangan laporan audit standar yang baru di Amerika akan diadopsi untuk Indonesia, barangkali format laporan audit di Indonesia nanti akan tampak seperti pada Peraga 4 di halaman sebelum ini.

Variasi dalam Praktik

Lepas dari berbagai hal yang dapat dipertimbangkan untuk kemungkinan perbaikan yang dibahas di atas, anggaphlah sekarang bahwa laporan audit standar versi buku NPA sudah memadai dan menjadi acuan otoritatif untuk praktik audit di Indonesia. Masalahnya sekarang adalah apakah para praktisi mengikuti standar yang telah ditetapkan badan yang berwenang tersebut. Variasi yang dibahas khusus ditujukan pada interpretasi terhadap makna GAAP-Indonesia yang di buku NPA disebut *prinsip akuntansi Indonesia*.

Peraga 5 di bagian atas halaman berikut merupakan ringkasan cara pengungkapan GAAP-Indonesia dalam laporan akuntan yang diperoleh dari 39 laporan tahunan dan prospektus yang dikeluarkan sejak 1986 sampai 1990. Karena buku NPA disahkan bulan Nopember 1986 maka variasi dalam pengungkapan laporan audit standar merupakan juga ukuran keefektifan buku tersebut sebagai standar karena harapannya adalah para praktisi akan mengacu pada buku tersebut. Variasi pengungkapan diambil atas dasar laporan audit dan bukan atas dasar kantor akuntan karena satu kantor akuntan kadangkadang menggunakan istilah yang berbeda untuk pengauditan laporan keuangan perusahaan yang berbeda atau untuk perusahaan yang sama tetapi untuk tahun yang berlainan. Dalam hal ini tentu saja harus dianggap bahwa tidak terjadi salah cetak dalam laporan tersebut. Dengan mengamati lebih banyak prospektus dan laporan tahunan (sampai akhir tahun 1991 misalnya), barangkali akan dijumpai lebih banyak variasi bahkan akan lebih banyak lagi variasi kalau ditambah dengan contoh laporan audit dalam buku-buku teks pemeriksaan akuntan berbahasa Indonesia.

Peraga 5

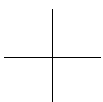
Cara penyebutan *generally accepted accounting principles-Indonesia* dalam 39 laporan akuntan yang diamati

Prinsip Akuntansi Indonesia	1
prinsip akuntansi Indonesia	4
prinsip akuntansi yang lazim	1
prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia	1
prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku	1
prinsip-prinsip akuntansi yang lazim	1
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia	20
prinsip akuntansi di Indonesia	1
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia	1
prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia	1
prinsip-prinsip akuntansi Indonesia	1
<i>accounting principles generally accepted in Indonesia</i>	1
<i>generally accepted accounting principles in Indonesia</i>	3
<i>Indonesian Accounting principles</i>	1
<i>generally accepted Accounting Principles</i>	1

Telah disebutkan bahwa tiap kata (istilah) dalam laporan audit mempunyai interpretasi yang standar. Jadi, kalau para akuntan publik menggunakan istilah yang berlainan dalam laporannya boleh jadi mereka memang ingin mengungkapkan hal atau makna yang berbeda. Dengan kata lain, perbedaan dalam pengungkapan makna GAAP-Indonesia mungkin menggambarkan perbedaan persepsi mengenai apa yang disebut dengan GAAP-Indonesia dan ini berarti bahwa mereka telah menggunakan kriteria yang berbeda untuk menyatakan pendapatnya. Kalau hal ini memang terjadi betapa tidak mantapnya (*precarious*) kedudukan, fungsi, dan manfaat laporan audit kita. Lebih dari itu, laporan audit merupakan suatu pernyataan resmi yang harus disusun atas dasar standar pelaporan tertentu. Jadi, kalau laporan audit yang sekarang beredar tidak sesuai dengan standar pelaporan di Indonesia (buku NPA), apakah laporan audit tersebut sebenarnya dapat dinyatakan sah? Apakah laporan audit yang sekarang beredar dapat dikatakan sesuai dengan GAAS-Indonesia?

Mengapa Bervariasi?

Tentu saja ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan adanya variasi pengungkapan makna GAAP-Indonesia tersebut. Apa yang akan dikemukakan penulis berikut ini adalah beberapa pikiran atau pendapat yang mungkin dapat menjelaskan timbulnya variasi tersebut. Pendapat ini tentu saja memerlukan tanggapan dan pengujian validitas agar penjelasan yang lebih andal dapat diketengahkan untuk menemukan "kebenaran" di balik variasi tersebut.



Pertama, para praktisi (akuntan publik) tidak menggunakan buku NPA sebagai acuan. Kalau mereka menggunakan buku NPA sebagai acuan tentu saja tidak akan terjadi variasi dalam pengungkapan GAAP-Indonesia. Kalau buku NPA dijadikan acuan, tentunya semua laporan akuntan yang diterbitkan sejak 1986 akan menyebut GAAP-Indonesia dengan istilah *prinsip akuntansi Indonesia*. Peraga 5 menunjukkan bahwa justru dari 39 laporan yang diamati istilah *prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia* adalah yang paling banyak digunakan (semuanya 20 buah dan diterbitkan oleh enam kantor akuntan termasuk satu badan pengawas pemerintah). Tidak bersedianya praktisi untuk menggunakan buku NPA merupakan indikasi bahwa buku NPA belum cukup efektif sebagai pedoman. Ketidakefektifan ini kemungkinan disebabkan para praktisi mengetahui bahwa buku tersebut diadopsi dari penerbitan resmi dari Amerika (yaitu *Statements on Auditing Standards*). Melihat bahwa buku NPA masih dirasa kurang lengkap dan terlalu umum menjadikan para praktisi kurang percaya dan kurang *comfortable* dengan NPA. Ketidakpercayaan tersebut mendorong praktisi untuk mengacu ke sumber asli baik SAS maupun buku teks pengauditan dan menginterpretasi serta menerjemahkan bahan-bahan tersebut sesuai dengan persepsi dan "selera" masing-masing. Dugaan yang sangat ekstrem adalah praktisi langsung mengacu ke sumber asli tanpa pernah membuka buku NPA.

Kedua, para praktisi (akuntan publik) merujuk ke buku NPA tetapi ada kesepakatan di antara para praktisi bahwa istilah *prinsip akuntansi Indonesia* dalam buku tersebut tidaklah tepat sehingga mereka beralih ke istilah aslinya dan menerjemahkannya. Dalam menerjemahkan ungkapan *generally accepted accounting principles* para praktisi barangkali mempunyai persepsi bahwa ungkapan tersebut merupakan frasa saja dan bukan merupakan istilah teknis yang mempunyai makna khusus sehingga dapat diterjemahkan menjadi frasa (kalimat) apa saja asal orang tahu bahwa aslinya adalah GAAP. Dengan kata lain, tidak ada pemahaman yang seragam terhadap makna dan konsep GAAP sehingga GAAP dianggap sebagai frasa saja. Akibatnya variasi terjadi seperti digambarkan dalam Peraga 5. Telah dibahas sebelumnya bahwa istilah GAAP bersifat lingkungan karena lahir di Amerika dan istilah itu merupakan suatu pengertian yang utuh dan bermakna khusus sehingga tidak dapat digunakan dan diterjemahkan begitu saja secara sembarangan. Oleh karena itu, kalau kita menyebut GAAP tanpa pewatas maka artinya adalah GAAP Amerika. Jadi kalau laporan audit di Indonesia menyebut istilah GAAP tanpa pewatas Indonesia maka berarti bahwa acuannya adalah GAAP Amerika. Apakah dalam kenyataannya memang para praktisi mengacu ke GAAP Amerika karena tidak adanya acuan yang spesifik Indonesia?

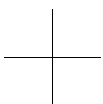
Mungkin dapat diantisipasi bahwa karena tidak ada acuan yang cukup mantap, akhirnya para praktisi akan menggunakan istilah yang paling banyak dipakai dengan mengacu pada laporan akuntan yang lain. Dengan demikian ada kecenderungan bahwa suatu saat akan terjadi keseragaman tetapi bukan karena "kebenaran" tetapi semata mata karena banyak orang yang memakai atau karena kantor akuntan tertentu yang kuat memakai ungkapan itu. Hal seperti ini adalah lumrah karena dalam kondisi ketidakpastian orang akan berlindung di bawah yang kuat atau paling laris. (Anehnya, mengapa tidak berlindung di bawah NPA?)

Walaupun tidak pas benar (bahkan menyimpang dari makna konsep yang terkandung dalam istilah GAAP), menurut pengamatan penulis, ada kecenderungan untuk menggunakan istilah *prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia* sebagai padan kata GAAP-Indonesia. Masalahnya adalah apakah istilah ini memang sudah merefleksikan makna GAAP-Indonesia? Apakah kenyataan ini menunjukkan adanya kesepakatan para praktisi untuk menyimpang dari standar atau justru menunjukkan kerancuan pemahaman atau bahkan ketidaktahuan terhadap konsep yang sebenarnya?

Ketiga, para praktisi barangkali mendasarkan pengalamannya pada apa yang pernah diperoleh di bangku kuliah dalam pengajaran mata kuliah pengauditan (*auditing*). Sementara itu dalam pengajaran pengauditan, konsep GAAP tidak dibahas pengertiannya secara mendalam sehingga mahasiswa mempunyai pemahaman bahwa GAAP yang ada di dalam buku teks setara dengan buku PAI¹¹ dan pemahaman ini diterima begitu saja oleh mahasiswa (*taken for granted*). Hal ini didasarkan pada pengamatan penulis terhadap buku-buku teks pengauditan berbahasa Indonesia. Keadaan ini menjadikan variasi pengungkapan GAAP yang ada tidak menjadi perhatian mereka bahkan pada saat mereka sudah menjalankan praktik audit sekalipun. Akibatnya mereka menganggap bahwa ungkapan apapun yang dipakai dianggap sama saja dan tidak menjadi masalah bahkan dianggap sepele. Lebih jauh, praktisi mungkin sepakat bahwa istilah apapun yang dipakai tidak menjadi masalah asalkan orang tahu bahwa yang dimaksud adalah GAAP-Indonesia. Sikap seperti ini barangkali akan menjadikan variasi pengungkapan (dan kerancuan pemahaman) akan tetap berlangsung di masa mendatang. Apakah profesi akan mempertahankan istilah *prinsip akuntansi Indonesia* (yang rancu dengan buku PAI) asalkan ada kesepakatan bahwa yang dimaksud *prinsip akuntansi Indonesia* (dengan "p" dan "a" kecil) adalah GAAP-Indonesia?

Mungkin masih ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa variasi tersebut terjadi atau bahkan mungkin ada justifikasi bahwa variasi tersebut harus diterima. Apa yang dikemukakan di atas adalah apa yang dapat ditangkap dan dipahami penulis atas dasar pengamatan subjektif terhadap praktik pelaporan keuangan di Indonesia yang belum menemukan bentuknya yang pas. Apapun yang menyebabkan perbedaan atau variasi pengungkapan makna penting dalam laporan audit tersebut, perbedaan tersebut merupakan gejala yang kurang sehat kalau ditinjau dari tujuan laporan audit sebagai alat untuk menambah keyakinan masyarakat pemakai akan keandalan laporan keuangan. Laporan akuntan dimaksudkan untuk meyakinkan kepada pemakai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan dan ketidakjujuran yang material serta disajikan sesuai dengan kriteria tertentu yang disebut prinsip akuntansi berterima umum. Kalau tidak ada pemahaman yang standar mengenai apa yang membentuk PABU-Indonesia dan kerangka kerjanya, apa yang telah diungkapkan dalam laporan audit di Indonesia sekarang ini mungkin secara substantif tidak ada manfaatnya bagi pemakai laporan keuangan walaupun secara yuridis atau bahkan secara administratif (misalnya memenuhi syarat *go public*) laporan audit tersebut tetap diperlukan.

¹¹Ikatan Akuntan Indonesia. *Prinsip Akuntansi Indonesia 1984*. Jakarta: PT Temprint, 1985.



Dalam jangka pendek memang tidak ada masalah dan risiko untuk tidak mengikuti standar, akan tetapi penulis yakin bahwa pada saat sistem hukum sudah menjadi lebih mantap dan kesadaran pemakai laporan akan perlindungan dan haknya makin tinggi maka pengungkapan yang tidak standar akan menimbulkan masalah bagi akuntan sendiri dan profesi.

Simpulan

Adanya variasi dalam pengungkapan laporan audit mungkin merupakan petunjuk bahwa buku NPA dan istilah *prinsip akuntansi Indonesia* khususnya belum berterima di kalangan praktisi. Akibatnya praktisi mencari jalan sendiri untuk menemukan standar yang dipandang paling cocok dengan persepsinya. Gejala ini jelas tidak menguntungkan profesi akuntan publik di masa mendatang. Kalau demikian, badan yang berwenang barangkali harus meninjau kembali standar pelaporan audit yang sekarang berlaku dan mengadakan perubahan seperlunya kalau hal tersebut memang dipandang penting. Hal ini sangat penting mengingat standar pelaporan yang telah ditentukan akan menjadi dasar untuk menentukan sah tidaknya suatu laporan audit.

Belum ada pemahaman dan pengertian yang jelas dan standar mengenai hubungan antara pengertian prinsip akuntansi (berterima umum) Indonesia, standar akuntansi (pernyataan standar IAI) dan buku Prinsip Akuntansi Indonesia sehingga timbul kerancuan baik dalam praktik maupun dalam dunia pendidikan. Bila istilah PABU- Indonesia sebagai padan kata GAAP-Indonesia dapat diterima (atau nanti akhirnya berterima) maka perlu dipikirkan kerangka kerja PABU-Indonesia (*The House of GAAP* versi Indonesia).

Kalau pengajaran pemeriksaan akuntan (pengauditan) memberi kontribusi terjadinya variasi pengungkapan atau kurang mengarahkan ke pemahaman yang standar tentang konsep PABU maka pengertian yang semestinya mengenai konsep PABU harus dibahas cukup intensif. Perlu diingat bahwa kerangka kerja PABU merupakan kriteria untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Bagaimana mungkin seseorang dapat menyatakan pendapat bahwa seperangkat laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan PABU- Indonesia kalau kerangka kerjanya tidak dipahami atau diketahui secara jelas. Dalam jangka pendek ini, pengajaran pengauditan harus memasukkan topik untuk membahas buku NPA dan buku PAI secara cukup memadai. Tujuannya bukan untuk membuat mahasiswa agar menganut buku tersebut mentah-mentah tetapi untuk menjadikan mereka memahami kedudukan buku tersebut dan kekurangan-kekurangannya dalam kerangka pelaporan keuangan di Indonesia. Dengan begitu mahasiswa menjadi skeptis, sensitif dan kreatif dalam mencari gagasan untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan buku tersebut sehingga pada gilirannya mereka (termasuk perguruan tinggi) akan mempunyai kontribusi dalam memperbaiki sistem pelaporan keuangan di Indonesia. Minimal pengajaran pengauditan harus dapat menghilangkan fiksasi fungsional terhadap pengertian bahwa buku PAI sama dengan GAAP-Indonesia. Lebih jauh, pengajaran pengauditan harus dapat menjadikan mahasiswa mampu untuk membedakan pengertian prinsip akun-

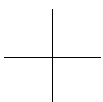
tansi (berterima umum) Indonesia, standar akuntansi dan buku PAI. Kesalahan dalam pengajaran dapat menyebabkan anekdot berikut ini menjadi suatu kenyataan.

Seorang sarjana baru jurusan akuntansi dari suatu perguruan tinggi diterima bekerja di suatu kantor akuntan publik. Dia segera mendapat tugas sebagai asisten untuk melakukan suatu audit. Tugasnya adalah menyelesaikan kertas kerja dan melaksanakan program yang telah disusun oleh seniornya. Setelah menyelesaikan tugasnya, sarjana baru tersebut sampai pada kesimpulan bahwa semua pos-pos yang diperiksanya adalah tidak wajar atau perlu kualifikasi. Pada suatu pertemuan dengan seniornya sarjana baru tersebut diminta menjelaskan mengapa semua pos-pos tersebut tidak wajar dan perlu dikualifikasi. Jawabnya: "Wah, semua tidak sesuai PAI, pak!" (PAI yang ada di dalam benaknya adalah buku PAI.)

Istilah melambangkan makna dan oleh karenanya lambang tersebut harus sesuai dengan makna yang melekat di dalamnya. Lambang yang tidak tepat akan menimbulkan *misnomer*: Hal yang perlu dicatat adalah bahwa *misnomer* dapat menimbulkan *misconception* atau bahkan *misconduct* yang dalam dunia profesi kemungkinan akan membentuk *malpractice*. Keadaan yang paling merugikan atau bahkan berbahaya bagi masyarakat adalah bahwa profesi sebenarnya telah melakukan malapraktik tetapi tak seorang pun menyadarinya. Sayangnya banyak orang yang mempertahankan *misnomer* semata-mata atas alasan keindahan dan tradisi. Memang diperlukan jiwa yang besar atau *political will* yang tinggi untuk mengubah suatu *misnomer*: Cukup besarkah jiwa kita untuk mengubah format dan kata-kata laporan audit standar kita? Lebih khusus lagi, cukup besarkah kemauan politis kita untuk mengganti istilah *prinsip akuntansi Indonesia* menjadi *prinsip akuntansi berterima umum Indonesia*? □

Referensi

- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). *Codification of Statements on Auditing Standards* New York: AICPA, 1986
- Badudu, J.S. *Inilah Bahasa Indonesia Yang Benar*. Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Carmichael, D. R., "What does the independent auditor's opinion really mean?" *Journal of Accountancy* (November 1974).
- Choi, Frederick D.S. dan Kazuo Hiramatsu. *Accounting and Financial Reporting in Japan*. Berkshire, England: Van Nostrand Reinhold UK, Co., Ltd., 1987.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Elliot, Robert K. dan Peter D. Jacobson. "The Auditor's Standard Report: The Last Word or In Need of Change?" *Journal of Accountancy* (Februari 1985).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Prinsip Akuntansi Indonesia 1984*. Jakarta: PT Temprint, 1985.
- _____. *Norma Pemeriksaan Akuntan*. Jakarta: PT Temprint, 1986.
- Kell, Walter G., William C. Boynton, dan Richard E. Ziegler, dan Richard E. Ziegler, *Modern Auditing*. New York: John Wiley & Sons, 1989.
- Landsittel, David L. "The Auditor's Standard Report: The Last Word or In Need of Change?" *Journal of Accountancy* (February 1987), hlm. 80-84.



- Moeliono, Anton M.** "Beberapa Aspek Masalah Penerjemahan ke Bahasa Indonesia," "Terms and Terminological Language," " Implikasi Penerjemahan dalam Pengembangan Bahasa Indonesia," dan "Aspek Teoretis dalam Penerjemahan," bab-bab dalam *Kembara Bahasa: Kumpulan Karangan Tersebar* (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 54-74 dan 195-208.
- Rinaldi, Irwan.** "Akuntan: Sudah Saatnya 'Go- Public'," *Akuntansi* No. 2 (Februari 1990), hlm. 29.
- Rubin, Steven.** "The House of GAAP," *Journal of Accountancy* (June 1984), hlm. 122-129.
- Suwardjono.** *Seri Teori Akuntansi: Perencanaan Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: BPFE, 1989. □

Halaman ini sengaja kosong untuk catatan.

suwardjono@ugm.ac.id

